

RINDU KEHIDUPAN ZAMAN MASYUMI¹

Oleh Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid sangat merindukan demokrasi. Ia juga mendambakan kehidupan umat Islam seperti di zaman Masyumi, tapi bukan untuk mendirikan negara Islam. Gagasan-gagasannya dalam menginterpretasikan ajaran-ajaran Islam di kalangan masyarakat selalu mengundang perhatian dan sering pula melahirkan sikap kontroversial. Baginya pembaruan pemikiran Islam merupakan keharusan. Tetapi pikiran-pikiran yang digulirkan Cak Nur, selalu mengundang pro dan kontra, karena jalan yang ditawarkan dianggap terlalu progresif, seperti tawaran sekularisasi dan penolakan terhadap negara Islam.

Gagasannya banyak ia salurkan dalam forum pengajian Paramadina. Kepada wartawan *AMANA*H, Ahmad Muzani dan Sholihul Hadi, Cak Nur menceritakan banyak hal. Berikut ini petikan wawancaranya.

Banyak warga masyarakat yang menuduh MPR hasil pemilu 1992 didominasi kelompok hijau (Islam). Mereka menyebutkan dengan “*ijo royo-royo*”. Dan Anda kini adalah salah satu anggota MPR. Bagaimana Anda merasakan hal itu.

¹ Majalah *Amanah*, “Rindu Kehidupan Zaman Masyumi”, 11-24 Januari 1993. Pewawancara Ahmad Muzani dan Sholihul Hadi.

Tuduhan itu benar dilihat dari segi lahiriah, sebab mereka teman-teman saya. Tapi itu sangat wajar karena bertemunya a kondisi obyektif dan keinginan subyektif. Jelasnya, ada faktor Pak Harto dan ada keinginan masyarakat. Dan itu hasil dari sebuah proses panjang yang merupakan efek dari kesepakatan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan di tahun 1950. Ketika itu dinyatakan bahwa sekolah agama akan mendapatkan pendidikan umum dan sekolah umum akan mendapatkan pendidikan agama. Sehingga banyak orangtua yang santri memasukkan anaknya di SD, karena mereka tidak mempunyai beban psikologis lagi.

Efeknya pada tahun 1960 jumlah BA (*Bachelor of Art*) berlimpah, dan pada tahun 1970 jumlah sarjana banjir. Tetapi ketika itu mereka disibukkan dengan urusan pribadi. Ada yang mencari kerja, ada yang mau kawin dan sebagainya. Pada tahun 1980-an, mereka mulai menoleh keluar, sehingga di mana-mana terjadi gejala Islam, baik di kantor, hotel dan lain-lain. Tapi gejala itu masih bersifat sosial. Baru pada tahun 1990 terasa adanya nuansa politis. Dan itu merupakan pertumbuhan yang sangat wajar. Bila dibendung maka akan sangat berbahaya, karena hal itu merupakan tindakan melawan arus. Pak Harto sebagai orang yang terlibat dalam proses pembangunan cukup mengerti, sehingga beliau pun setuju berdirinya ICMI, selain beliau merasa cukup aman bergaul dengan umat Islam. Oleh karena itu apa yang disebut “hijau” merupakan sesuatu yang sangat wajar, dan itu akan terus berlanjut menuju kepada keseimbangan baru. Sebab sekarang keadaan memang belum cukup berimbang.

Apa karena kondisi obyektif itu Anda terlalu terlibat dalam proses berdirinya ICMI?

Saya termasuk perintis, oleh karena itu saya paling sakit hati, jika dibilang ICMI adalah organisasi hasil rekayasa dari atas. Dan mana kesimpulan itu? Kita bertahun-tahun merintis hal itu tapi selalu gagal. Pernah dicoba dengan pertemuan di Yogya, tapi di

tengah jalan dibubarkan polisi. Kalau kemudian anak-anak Malang mendekati Habibie, dan kemudian didukung teman-teman, itu faktor kebetulan saja. Kalau seandainya tidak mendapat dukungan dari atas pun tidak berarti hal itu tidak terjadi, namun hanya akan tertunda satu atau dua tahun.

Tapi keterlibatan Anda dalam ICMI apa tidak bertentangan dengan ide-ide Anda, yang ingin menisbikan simbol-simbol keagamaan dengan “Islam yes dan Partai Islam no”, misalnya?

Tidak *dong*, karena kita melihatnya dari segi institusionalisasi. Dan efek yang diharapkan adalah transformasi mental dari sikap oposisi kepada sikap yang lebih positif. Ibarat permainan bola, penonton *kan* suaranya seringkali lebih keras ketimbang pemain. Tapi coba penonton disuruh main, pasti mereka akan diam. Seberat-berat mata memandang masih berat bahu memikul. Dengan kata lain, selama orang masih menderita mentalitas luar pagar, maka mereka akan mempergunakan retorika. Dan hal itu, akan semakin menarik apabila disertai dengan kecaman, sebab yang digugah adalah emosi.

Jadi Anda melihat ada pertemuan ide, antara gagasan yang selama ini Anda pikirkan dengan ICMI?

Ya, tapi titik fokusnya tetap pada relativitas kehidupan politik. Artinya, dengan adanya ICMI orang-orang yang tadinya di luar pagar kini mereka masuk semua. Bahkan mereka kini mengerti tentang problem negara, karena dekat dengan kekuasaan. Dengan begitu dalam menilai sesuatu menjadi relatif dan selalu dalam konteks. Kondisi seperti itu penting, karena problem kita adalah pengalihan kekuasaan secara damai dan konstitusional. Ini belum pernah kita alami.

Sebab jika dalam lima tahun mendatang terjadi peralihan kekuasaan secara tidak damai dan terjadi pertumpahan darah, hal

itu sangat berbahaya. Sebab kita akan terjebak dalam eksperimen terus entah sampai kapan. Sehingga apa yang dikatakan Simatupang, yakni Amerika Latin sebagai deretan peralihan kekuasaan berdarah, akan juga benar. Untuk menghindari hal itu, maka masyarakat harus terlatih untuk berpikir bahwa siapa pun boleh menjabat presiden asal memenuhi syarat. Karena itu perlu relativitas atau penisbian politik. Jadi politik tidak totaliter, yakni perasaan bahwa dirinya yang paling benar. Sebab inilah pangkal terjadinya *clash*.

Tapi Gus Dur, sudah mengingatkan jauh-jauh hari sebelumnya kepada ICMI, akan perlunya kesamaan dalam alam demokrasi dan dihormatinya pluralisme. Dan ICMI dalam pandangan Gus Dur arahnya sektarian.

Secara makro Gus Dur itu banyak sekali berbuat untuk masyarakat, oleh sebab itu baik di dalam atau di luar negeri saya selalu membelanya. Tapi secara mikro, banyak sekali yang saya tidak sependapat. Misalnya ketika dia menuduh ICMI cenderung sektarian. Tapi walau begitu, sikapnya yang oposisi terhadap ICMI saya kira bagus. Karena ICMI memang perlu oposisi, lepas dari motifnya. Apakah dia melakukan itu betul-betul dalam kerangka demokrasi, atau karena sentimen lainnya. Bagi saya itu tidak penting, tapi yang perlu adalah hasil akhirnya.

Oleh karena itu saya tidak pernah memperdulikan kalau ada yang mengatakan bahwa Gus Dur terus-menerus mengkritik ICMI karena dia tidak dilibatkan sejak awal. Terserah saja, saya tidak menghiraukannya. Yang pasti ada orang yang berperan sebagai oposisi, dan itu harus dihormati. Bila sejak awal kita tidak bersikap seperti itu, maka kita tidak akan bisa berlaku demokratis.

Tapi bagaimana dengan tuduhan Gus Dur yang menyebutkan bahwa para pengurus ICMI adalah orang-orang yang mempunyai ambisi.

Kalau saya rileks saja. Biarin saja kalau memang dalam proses mengharuskan tampilnya orang-orang semacam itu. Saya sendiri sedikit menjauh dari ICMI, sebab bagi saya ICMI tidak lagi berkaitan dengan persoalan “luar pagar”, karena saya telah terlatih hal itu sejak dulu. Tapi bagi mereka yang belum terbiasa dengan persoalan “luar pagar” atau teman-teman menyebutnya “hijrah mental” yang penting masuk dulu. Sebab dari situ mereka akan tahu arti penisbian, di mana kalau benar kita dapat mengatakan dengan bebas bahwa hal itu memang benar, demikian juga kalau salah.

Sikap seperti itu akan terbentuk apabila kita mengakui adanya oposisi, adanya kebebasan menyatakan pendapat, adanya kebebasan pers. Karena itu sistem pemilu harus diubah, saya tidak tahu bagaimana. Tapi yang jelas, sistem sekarang ini harus diarahkan kepada cara yang memungkinkan seorang wakil rakyat tahu betul-betul rakyatnya. Artinya, dia tahu daerah pemilihannya dengan jelas, dia mewakili siapa. Sehingga kalau ada rakyat bertanya, apa yang dapat dia perbuat selama menjadi wakil rakyat, jawabannya cukup jelas. Sistem distrik itu jelas sekali. Misalnya saya dipilih oleh orang Jombang, ketika reses saya pulang ke Jombang. Di situ saya dapat sampaikan hasil kerja saya selama di parlemen. Kalau ada hal-hal yang tidak beres, saya bisa bawa masalah itu ke dewan.

Tapi kalau sekarang mereka wakil siapa? Kalau pimpinan partai bilang begini, mereka nurut begini. Ini yang menjadi sumber banyaknya tuduhan bahwa DPR kurang berfungsi. Sebagai misal, lima tahun yang lalu saya menjadi anggota badan pekerja MPR. Masya Allah, ada juru bicara dari salah satu fraksi yang kualitasnya sangat rendah sekali. Saya sendiri mendengarnya malu, sebab dengan juru dakwah di kampung sini saja belum tentu dia lebih baik. Soalnya mereka itu nama-nama yang didrop dari pimpinan, sehingga belum tentu memahami persoalan di daerah pemilihannya, sebab rakyat memilih tanda gambar, bukan memilih orang yang benar-benar dianggap dapat menjadi wakilnya.

Maka ketika Naro lima tahun yang lalu dicalonkan menjadi wakil presiden, saya mendukung. Tapi sejak awal sudah saya beri tahu. “Jika terjadi pemilihan maka saya tidak akan pilih Anda.” Tapi keberanian itu menurut saya bagus, meski sebenarnya hal itu sudah dilontarkan sejak awal (kampanye), agar rakyat terbiasa dengan pilihan alternatif. Tapi untuk sekarang karena pertumbuhan masyarakat mengharuskan begini, maka kita tolerir saja dulu. Sebab mempertimbangkan ongkos yang harus kita bayar. Kita menghendaki stabilitas, berlangsungnya pemangunan, maka semua itu harus mempertimbangkan ongkos.

Jadi Anda tidak mengingkari adanya kepentingan politik tertentu dalam tubuh ICMI, terutama dari para pengurusnya?

Saya tidak mengingkari hal itu. Bahkan orang-orang dalam ICMI sendiri sudah mengatakan hal itu. Misalnya jumlah anggota ICMI yang duduk di parlemen cukup banyak. Tapi semua itu sebenarnya kebetulan, sebab terbentuknya ICMI sendiri sangat anekdotal. Malah Amien Rais justru tidak terlibat sejak awal. Watik Pratiknya juga tidak tahu. Oleh sebab itu jika ada orang yang paling berbahagia dengan terbentuknya ICMI, Imaduddin-lah orangnya. Dan ICMI terbentuk karena adanya keinginan dari bawah dan spontanitas dukungan Pak Harto.

Habibie sendiri sebenarnya ketika diminta oleh anak-anak Malang untuk berbicara dalam seminar, menolak. Bahkan cenderung tersinggung dengan mengatakan, “Kalian ini ada-ada saja, saya *kan* bukan ahli keislaman”. Tapi kemudian diingatkan oleh Pak Alamsjah dan Pak Saleh Afiff. Karena dia sebagai pembantu presiden akhirnya dikonsultasikan masalah itu kepada Pak Harto. Sebelumnya saya diminta untuk menuliskan draft menyiapkan berdirinya ICMI. Sebenarnya saya mengusulkan nama ISMI (Ikatan Sarjana Muslim Indonesia) yang dalam bahasa Arab, berarti “nama saya” atau “inilah saya”. Tapi oleh Pak Habibie

diganti dengan cendekiawan, maksudnya agar tidak terikat dengan formalitas. Tapi saya kira itu benar.

Kepada Pak Harto pun dia masih menolak, akhirnya ditunjuk Pak Munawir, Pak Azwar, Pak Rudini, Pak Fuad, Pak Sumintapura, Pak Baiquni dan saya, untuk membantu. Tapi Habibie masih juga menolak, alasannya kalau menjadi ketua organisasi dia akan terpisah dari Pak Harto dan dia merasa tidak tahu banyak tentang keislaman. “*Lho*, kenapa harus berpisah. Kamu tidak sendirian mengurus organisasi,” jawab Pak Harto seperti ditirukan Pak Habibie, lalu Pak Harto mengatakan, “Kalau kamu masih ragu, maka kamu saya perintah untuk memimpin,” Pak Harto memberi intruksi.

Jadi kelahiran ICMI benar-benar dari bawah. Ketika orang berpikir Habibie yang terkesan adalah teknologinya, bukan politik. Dia menjadi idola di kalangan anak-anak karena kecerdasannya. Oleh sebab itu ketika para wartawan terutama dari luar mengatakan bahwa ini proyek politik, saya marah besar. Mereka menyebutnya ini tingkah laku Soeharto untuk memperoleh karcis Islam (*Islamic ticket*). Kalaupun kemudian sekarang terjadi langkah-langkah politik, menurut saya itu kebetulan saja. Kalau kita tahu akan terjadi begini dan boleh memilih, saya memilih menunda berdirinya ICMI. Tapi itu *kan* berarti akan mentah lagi, karena memang sudah waktunya.

Sampai ada pengurus ICMI pusat yang mengatakan, dulu ICMI ditakuti oleh orang-orang non-Islam karena mereka membayangkan akan menjadi gerakan ilmiah dan intelektual yang besar. Tapi sekarang mereka menertawakan kita karena ternyata itu-itu saja (politik). Saya cuma tertawa. Sebab menurut saya perubahan ke arah politik itu bukan tujuan, namun kebetulan. Oleh karena itu teman saya tadi mengatakan, biarkan saja ICMI berkembang seperti sekarang, sambil menunggu di antara mereka siapa yang menjadi menteri dan lain sebagainya. Baru setelah itu ICMI kita ambil kembali dan kita luruskan sampai betul-betul menakutkan orang.

Ada anggapan, bahwa ICMI sebagai Masyumi muda. Menurut Anda bagaimana?

Kalau yang dimaksud adalah Masyumi tahun 50-an, di mana masih bersifat inklusif dalam pergaulan tidak saja dengan NU, tapi juga dengan PNI, PSI, Parkindo, Partai Katolik. Sebab pergaulan itu *platform*-nya adalah demokrasi modern. Dalam hal itu justru saya sangat menyesalkan, karena orang Masyurni ternyata tidak menulisnya, sehingga terkesan, kiprahnya dilakukan secara *accident*. Barangkali karena mereka terlibat dalam revolusi, sehingga tidak sempat menulisnya. Padahal kalau itu ditulis akan mudah diwariskan kepada generasi berikutnya.

Rumah Pak Prawoto (almarhum) di Jalan Kertosono IV, itu diperoleh antara lain atas bantuan Pak Kasimo (I.J. Kasimo), tokoh Katolik. Mungkin karena mereka merasa sesama pejuang. Demikian juga Pak Roem. Dia selalu mengadakan ulang tahun tapi yang diundang bukan para kiai, justru orang-orang seperti Simatupang dan sebagainya. Dan beliau melakukan itu tanpa stigma, rintangan batin. Situasi seperti itulah yang saya rindukan. Maka sebenarnya kalau saya boleh mengklaim sayalah Masyumi muda, tapi Masyumi tahun 50-an itu. Anehnya orang-orang Masyumi sendiri tidak suka.

Memang benar kalau dikatakan bahwa saya sedang menghidupkan situasi Masyumi tahun 50-an. Tapi karena *by accident*, sehingga akan sangat rawan. Sebab kita akan dihapus begitu saja oleh orang-orang yang tidak tahu sejarah. Karena itu yang saya lakukan adalah mengembalikan penalaran intelektual. Maka argumen yang saya pakai sekitar pluralisme, inklusivisme, toleransi, saling menghargai, relativisme politik dan sejenisnya. Semua itu muaranya pada demokrasi. Apalagi kalau dari kaca mata orang-orang Cornell, Masyumi itu *kan* kampiun *western democracy*. Tapi lagi-lagi Masyumi tahun 50-an yang liberal, inklusif dan demokrat. Bukan Masyumi tahun 60-an, yang terobsesi mendirikan negara Islam.

Soalnya halangan saya masalah retorika. Artinya saya tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah Masyumi, karena akan banyak rintangan. Apa gunanya saya mengatakan hal itu, padahal saya selalu mengatakan bahwa simbol itu tidak penting. Sebab kalau saya melakukan hal itu berarti saya mementingkan simbol.

Dan kondisi sekarang sudah berbeda. Misalnya 20 tahun yang lalu ketika saya menyampaikan ceramah sekularisasi di TIM, reaksinya luar biasa. Tapi ketika saya menyampaikan makalah kembali pada bulan Oktober 1992, reaksinya terasa dingin sekali seperti es. Sebab seperti itu dulu saya ladeni, tapi sekarang suasananya sudah jauh sama sekali. Itu artinya apa yang kita cita-citakan kalau tidak besok, mungkin lusa atau minggu depan akan dapat terlaksana. Oleh karena itu dalam masyarakat harus ada orang seperti Gus Dur, yang dalam soal makro dia luar biasa. Dia tidak mempedulikan dirinya sekalipun hancur untuk mementingkan sesuatu yang makro.

Tapi Ridwan Saidi menulis di beberapa media mengkritik Anda secara tajam. Mengapa Anda tidak menanggapi?

Percuma saja, *toh* akhirnya akan menjadi polemik. Mereka sudah berkeinginan begitu *kok*, maka apa pun yang saya katakan mereka akan menanggapi menurut keinginannya. Niatnya *kan* bukan untuk dialog. Tapi penjelasan saya lebih banyak dengan lisan di berbagai kesempatan, misalnya lewat Paramadina, atau dalam buku-buku. Tapi memang susah berbicara kepada orang yang tidak tahu khazanah intelektual, walau yang saya katakan belum tentu benar. Tapi *kan* saya membaca kitab-kitab kuning. Oleh karena itu yang selalu lebih dulu paham adalah para kiai di pesantren, soalnya mereka tahu kitabnya. Dan tanggapan mereka sangat positif.

Tapi tampaknya orang-orang Masyumi tidak bisa menerima pemikiran Anda, bahkan ada kesan oposisi. Apa Anda juga merasakan hal itu?

Ya, mereka adalah Masyumi pasca pemilu tahun 1955, yakni Masyumi yang berobsesi negara Islam. Mereka terkungkung oleh retorikanya sendiri di konstituante. Mestinya ketika mereka gagal memperjuangkan negara Islam, Masyumi segera kembali kepada awal 50-an, yakni kembali kepada demokrasi. Dan Kabinet Natsir, itu *kan* kabinet yang demokrat betul.

Dulu kita pernah mencoba berdialog dengan Pak Prawoto, tapi pendirian beliau memang beda dengan kita. Misalnya beliau ingin menghidupkan kembali Masyumi, walau hanya sehari sesudah itu dibubarkan kembali. Itu *kan* alasan yang legalistis. Sebab beliau berpendirian pembubaran Masyumi tidak melalui prosedur yang sah. Buat kita tentu saja tidak begitu. Buat apa berdiri kalau hanya untuk dibubarkan, biayanya terlalu mahal. Tapi ya, Pak Prawoto *kan* seorang ahli hukum.

Kepada Pak Natsir kita juga pernah bertemu. Ketika menjadi Perdana Menteri, beliau berkunjung ke Pakistan. Dalam pidato-pidatonya beliau selalu mengatakan bahwa Pakistan dan Indonesia itu sama. Kalau Pakistan didirikan atas dasar Islam, Indonesia didirikan atas dasar Pancasila, di mana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti tauhid. Semua orang tahu karena peristiwa itu direkam dan disebarluaskan. Tetapi setelah sampai di sini (Indonesia) beliau tidak berani mengelaborasi, takut bertentangan dengan teman-temannya sendiri seperti Isa Anshari. Ini yang saya sesalkan. Pernah beliau kita undang untuk berdiskusi soal ini, namun beliau menolaknya. Akibatnya yang tinggal adalah cerita Masyumi dulu, yang tidak ada otentifikasinya. Saya dan teman-teman merasa jalan pikiran Masyumi itu seperti yang sekarang kita kembangkan dalam Paramadina. Dan itu *kan* sah-sah saja. Sebab saya ini anak Masyumi. Bapak saya Masyumi tulen meski ibadahnya NU, dan ibu saya seorang kampanyewati Masyumi.

Tak heran ketika saya tampil di TIM saya dituduh PNI. *Wong* Pak Natsir saja dulu dituduh Pak Roem terpengaruh Syahrir yang PSI. Waktu itu, saya, Pak Roem dan Pak Anwar Haryono satu mobil turun dari Puncak. Sepanjang jalan beliau membicarakan

Masyumi, dan yang paling disesalnya adalah Masyumi partai besar tetapi ketuanya dikalahkan oleh partai kecil yaitu PSI. Itu misalnya dapat terbaca dalam surat-surat saya kepada Pak Roem dari Chicago.

Apa sebenarnya obsesi Anda yang hendak dicapai tentang Indonesia dan umat Islam melalui ide-ide yang dianggap orang kontroversial itu?

Indonesia yang akan datang itu seperti sosok santri yang canggih. Kenapa santri? Sebab santri itu egaliter, terbuka, kosmopolit dan demokratis. Dan ini merupakan pola budaya pantai, sebab sekarang kita masih didominasi oleh pola budaya pedalaman (*in land culture*). Dengan kata lain, suatu penampilan Islam di zaman modern yang menyerap secara konstruktif dan positif kehidupan modern, namun semuanya tetap dalam nilai-nilai keislaman. [❖]